

ANALISIS STRATEGI MENINGKATKAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NUNUKAN

Strategic Analysis To Improve Business Licensing Issuance At The Investment And One-Door Integrated Services Office Of Nunukan Regency

Nama Penulis ✉

Rakhmat Hidayat^{1*}, Nurmadhani Fitri Suyuthi², Mulyadi Hamid³

^{1,2,3}Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar.

*Email: rakhmat610@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan penerbitan perizinan berusaha, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat dan staf DPMPTSP serta pelaku usaha yang pernah menggunakan layanan perizinan berbasis OSS-RBA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Nunukan menerapkan strategi berupa digitalisasi layanan melalui OSS-RBA, penyederhanaan prosedur, penyusunan SOP, sosialisasi multi-media, pendampingan langsung, inovasi layanan jemput bola melalui program Ikan Mas Jemput Bola, serta koordinasi lintas-OPD untuk mempercepat verifikasi dokumen. Faktor pendukung strategi ini antara lain dukungan regulasi nasional, komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, dan ketersediaan infrastruktur teknologi. Namun demikian, terdapat hambatan yang cukup signifikan berupa gangguan sistem OSS, keterbatasan jaringan internet, kelengkapan dokumen yang belum sesuai, serta rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur perizinan digital. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan perizinan di Kabupaten Nunukan sangat ditentukan oleh kombinasi strategi teknis, dukungan kebijakan, dan kesiapan pelaku usaha dalam beradaptasi dengan sistem digital

Kata Kunci: *Perizinan Berusaha, OSS-RBA, Strategi Peningkatan, DPMPTSP*

Abstract

This study aims to analyze the strategies implemented by the Nunukan Regency Investment and One-Stop Integrated Services Office to increase business licensing and identify factors that support and hinder its implementation. The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews, and documentation studies. The research informants consisted of DPMPTSP officials and staff, as well as business actors who had used OSS-RBA-based licensing services. The research results show that the Nunukan Regency DPMPTSP implemented a strategy of service digitization through the OSS-RBA (Online Business License) system (OSS-RBA), procedural simplification, SOP development, multimedia outreach, direct assistance, innovative outreach services through the Ikan Mas Jemput Bola (Goldfish Jemput Bola) program, and cross-OPD coordination to expedite document verification. Supporting factors for this strategy include national regulatory support, leadership commitment, human resource competency, and the availability of technological infrastructure. However, significant obstacles remain, including disruptions to the OSS system, limited internet access, incomplete documents, and business actors' lack of understanding of digital licensing procedures. These findings confirm that the success of improving licensing in Nunukan Regency is largely determined by a combination of technical strategies, policy support, and business actors' readiness to adapt to digital systems.

Keywords: *Business Licensing, OSS-RBA, Improvement Strategy, DPMPTSP*

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam birokrasi perizinan merupakan pilar utama reformasi struktural Indonesia untuk meningkatkan daya saing investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja, pemerintah menggeser paradigma perizinan dari berbasis izin (*license-based*) menjadi berbasis risiko (*Online Single Submission – Risk Based Approach* atau OSS-RBA). Kebijakan ini, yang dipertegas dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, bertujuan untuk menciptakan standar pelayanan yang transparan, akuntabel, dan efisien dengan mengklasifikasikan usaha berdasarkan tingkat risiko terhadap lingkungan dan sosial (Rendah, Menengah, dan Tinggi).

Namun, transisi dari sistem manual-sektoral ke digital-terintegrasi memicu dinamika implementasi yang kompleks, terutama di tingkat daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai aktor kunci di daerah dihadapkan pada tantangan sinkronisasi antara kebijakan pusat yang modern dengan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi lokal. Secara teoritis, sistem OSS-RBA seharusnya memangkas waktu birokrasi, namun dalam praktiknya, hambatan verifikasi teknis lintas instansi dan rendahnya literasi digital pelaku usaha sering kali mengakibatkan ketidakpastian waktu penerbitan izin. Hal ini menciptakan celah (*gap*) antara ekspektasi efisiensi kebijakan nasional dengan realitas pelayanan di lapangan.

Kabupaten Nunukan menjadi lokus penelitian yang strategis sekaligus unik karena posisinya sebagai beranda terdepan NKRI yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Posisi geopolitik ini memberikan Nunukan keunggulan komparatif di sektor perdagangan lintas batas, perikanan, dan jasa. Potensi tersebut terjustifikasi oleh data realisasi investasi yang mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2023 hingga mencapai Rp9,44 triliun. Meskipun demikian, dinamika investasi ini belum diiringi oleh stabilitas penerbitan izin. Berdasarkan data DPMPTSP Kabupaten Nunukan, terdapat fluktuasi tajam dalam jumlah izin terbit, di mana terjadi penurunan dari 2.361 izin pada tahun 2023 menjadi 1.757 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala pada klasifikasi risiko menengah tinggi hingga tinggi yang memerlukan verifikasi teknis lebih kompleks serta kendala geografis dalam menjangkau pelaku usaha di wilayah terpencil.

Guna mengatasi hambatan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Nunukan telah menginisiasi berbagai layanan adaptif seperti "layanan jemput bola", pendampingan *online*

via WhatsApp, hingga layanan berbantuan langsung. Namun, efektivitas inovasi tersebut dalam menjawab problematika kesalahan administratif oleh pelaku usaha dan gangguan teknis sistem OSS masih memerlukan evaluasi mendalam. Belum adanya analisis komprehensif mengenai efektivitas strategi adaptif di wilayah perbatasan yang memiliki keterbatasan infrastruktur internet menjadi urgensi utama penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS-RBA di DPMPSTP Kabupaten Nunukan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasinya. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris mengenai model pelayanan perizinan yang responsif di wilayah perbatasan, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan iklim investasi daerah yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam terkait strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan penerbitan perizinan berusaha di Kabupaten Nunukan. Penelitian kualitatif bersifat naturalistik, berusaha memahami makna, dan menggali informasi secara holistik berdasarkan pandangan subjek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai strategi yang diterapkan, faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas pelayanan perizinan berusaha.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, karena instansi ini berperan penting dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerbitan perizinan berusaha. Lokasi ini dipilih berdasarkan kesesuaian objek, tanggung jawab kelembagaan, serta peluang untuk memperoleh data primer dan sekunder yang relevan. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada Bulan Maret – Mei 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi strategi yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan penerbitan perizinan berusaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPMPSTP dan pelaku usaha, strategi peningkatan penerbitan perizinan berusaha di Kabupaten Nunukan telah dilakukan melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, sosialisasi aktif, pendampingan langsung, serta inovasi pelayanan jemput bola. Perencanaan strategi disusun secara terukur dengan melibatkan berbagai pihak internal dan diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti OSS-RBA dan UU Cipta Kerja.

Meskipun terdapat kendala seperti gangguan sistem dan sulitnya menjangkau pelaku usaha tertentu, solusi diberikan melalui diversifikasi saluran komunikasi, pendampingan intensif, dan alternatif layanan tatap muka. Harapan ke depan difokuskan pada peningkatan keterpaduan sistem, dukungan anggaran, simplifikasi regulasi, penambahan petugas lapangan, serta panduan praktis bagi UMKM agar proses perizinan semakin cepat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pelaku usaha

Identifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerbitan perizinan berusaha di Kabupaten Nunukan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat utama penerbitan perizinan berusaha di Kabupaten Nunukan adalah gangguan jaringan internet dan sistem OSS-RBA, yang berdampak pada kelancaran proses verifikasi dan penerbitan izin. DPMPTSP telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan ini, seperti membuka loket pra-verifikasi, menyederhanakan checklist persyaratan, melakukan pelatihan, serta meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis. Pelaku usaha juga mengungkapkan adanya kendala non-teknis seperti keterbatasan waktu, biaya yang dianggap tidak sebanding dengan manfaat, dan persepsi bahwa usaha kecil tidak memerlukan pengawasan formal.

Dari sisi pelayanan, strategi jemput bola dan layanan berbantuan dinilai sangat membantu, meskipun masih terdapat keluhan seperti lamanya proses verifikasi, informasi yang berbeda antar petugas, dan belum adanya layanan khusus bagi UMKM, pelaku usaha rentan, dan penyandang disabilitas. Rekomendasi yang diajukan meliputi penambahan frekuensi sosialisasi, penyediaan panduan praktis, perbaikan akses internet publik, penambahan jumlah petugas, serta pengembangan layanan inklusif dan pendampingan langsung di tingkat kecamatan. Keseluruhan masukan ini menunjukkan bahwa meskipun strategi yang diterapkan sudah dirasakan manfaatnya, masih diperlukan peningkatan kualitas, pemerataan akses, dan inovasi layanan untuk menjangkau seluruh pelaku usaha secara efektif.

Pembahasan

Deskripsi strategi yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan penerbitan perizinan berusaha.

Strategi merupakan rencana berskala besar yang berorientasi pada masa depan untuk menghadapi kondisi persaingan dan mencapai tujuan organisasi. Menurut Pearce II dan Robinson (2008), strategi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman arah, tetapi juga sebagai langkah terpadu untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar mampu merespons tantangan dan peluang secara efektif. Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, strategi menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan proses perizinan berjalan cepat, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini menjadi relevan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan yang berupaya meningkatkan penerbitan perizinan berusaha melalui serangkaian program dan inovasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, baik dari pihak internal dinas maupun pelaku usaha, ditemukan sebelas poin utama yang menggambarkan bagaimana strategi tersebut direncanakan, diimplementasikan, dan dievaluasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan investasi daerah.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Lestari dan Zulkarnaini (2023) dalam studi mereka di Kabupaten Indragiri Hulu, di mana dukungan pemerintah daerah, tersedianya infrastruktur teknologi, dan kompetensi aparatur menjadi elemen penting bagi keberhasilan OSS-RBA, meskipun masih diperlukan perbaikan sistem aplikasi dan penguatan kapasitas SDM. Perbandingan ini menunjukkan bahwa harapan DPMPTSP Kabupaten Nunukan relevan dan realistis, karena fokus pada aspek yang memang terbukti berpengaruh besar terhadap efektivitas pelayanan perizinan di berbagai daerah.

Identifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerbitan perizinan berusaha di Kabupaten Nunukan

Keberhasilan implementasi strategi peningkatan penerbitan perizinan berusaha dipengaruhi oleh kombinasi kekuatan internal dan eksternal yang mampu mendorong efektivitas layanan. Dalam perspektif manajemen strategis, sebagaimana dijelaskan oleh Pearce II & Robinson (2008), faktor pendukung berperan sebagai penguat keberhasilan strategi, sementara faktor penghambat menjadi tantangan yang harus diantisipasi.

Implementasi strategi yang berjalan baik biasanya didukung oleh regulasi yang jelas, koordinasi lintas sektor, kompetensi sumber daya manusia, dan dukungan teknologi yang memadai. Sebaliknya, kelemahan pada salah satu unsur tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses pelayanan publik, termasuk perizinan berusaha.

Hasil penelitian menunjukkan sejumlah faktor yang memperkuat pelaksanaan strategi di Kabupaten Nunukan. Pertama, dukungan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021 yang memberikan dasar hukum dan panduan teknis bagi pemerintah daerah. Regulasi ini memudahkan proses penyederhanaan perizinan, mengatur klasifikasi risiko, dan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengadaptasikan kebijakan sesuai kondisi wilayah.

Dengan demikian, meskipun strategi sudah didukung oleh faktor internal yang kuat, hambatan teknis, literasi pelaku usaha, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara sistematis.

Jika dikaji menggunakan kerangka Pearce II & Robinson (2008), faktor pendukung di Nunukan mencerminkan kekuatan (*strengths*) pada aspek regulasi, koordinasi, kompetensi SDM, dan inovasi teknologi. Faktor-faktor ini memberikan keunggulan kompetitif dalam penyediaan layanan perizinan. Namun, faktor penghambat yang muncul—terutama masalah jaringan, literasi pelaku usaha, dan keterbatasan anggaran—termasuk dalam kategori kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Kesamaan dengan penelitian di daerah lain menunjukkan bahwa hambatan OSS-RBA bersifat struktural dan belum sepenuhnya teratasi secara nasional. Perbedaannya, di Nunukan koordinasi antarinstansi dinilai relatif efektif, namun keterbatasan infrastruktur digital dan cakupan sosialisasi menjadi kendala yang masih membatasi capaian strategi.

Dengan mengoptimalkan faktor pendukung yang ada dan mengatasi hambatan yang ditemukan, strategi peningkatan penerbitan perizinan berusaha di Kabupaten Nunukan berpotensi lebih efektif dalam mendorong legalitas usaha, meningkatkan iklim investasi, dan memperluas kesempatan kerja di daerah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan strategi peningkatan penerbitan perizinan berusaha di Kabupaten Nunukan memiliki landasan yang kokoh melalui dukungan regulasi, koordinasi lintas instansi, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi. Namun, hambatan teknis, keterbatasan literasi pelaku usaha, dan sumber daya masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan perluasan cakupan layanan lapangan menjadi langkah strategis yang relevan untuk memperkuat implementasi strategi ke depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dari itu peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan perizinan berusaha di Kabupaten Nunukan telah berjalan terarah melalui digitalisasi OSS-RBA, layanan jemput bola, penyederhanaan SOP, dan sosialisasi. Keterlibatan lintas pihak serta dukungan kebijakan nasional memperkuat

implementasi, meski masih diperlukan penguatan sistem, dukungan anggaran, dan perluasan jangkauan layanan.

2. Faktor pendukung strategi meliputi regulasi nasional, koordinasi antar-OPD, kompetensi pegawai, dan inovasi layanan. Hambatan yang dihadapi terutama terkait gangguan sistem OSS-RBA, keterbatasan pemahaman pelaku usaha, dan minimnya anggaran. Keberhasilan strategi bergantung pada optimalisasi faktor pendukung serta penanganan hambatan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurrahman, A., Iswanto, D., Rijlan, R., & Rifaid, R. (2022). Pemanfaatan teknologi informasi sebagai bentuk percepatan pelayanan publik di kecamatan lembar lombok barat. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 164-173.
2. Adamy, M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta
3. Ainita, O. (2015). Redesain Implementasi Perizinan untuk Meningkatkan Ekosistem Investasi Daerah. *Journal of Law*, 3(1), 5–24.
4. Amalia, S. W. (2023). *Pengaruh Asas Fiktif Positif dalam Penerbitan Perizinan Berusaha melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) = The Influence of Positive Fictitious Principles in the Issuance of Business Licenses Through the Online Single Submission Risk Based Approach System (OSS RBA)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
5. Bahroni, R., Rumbekwan, M., & Ginting, A. H. (2022). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan berusaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 71–85. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>
6. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
7. Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. (2024). Efektivitas *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA): Inovasi Perizinan berusaha Mikro Kecil di Perkotaan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 103–116. <https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.103-116>
8. Fajri, M. R., & Astuti, S. J. W. (2024). *Efektivitas Sistem Perizinan Online OSS RBA terhadap Pengembangan UMKM di Kabupaten Gresik*. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(1), 60–69. ISSN: 2829-1352.
9. Harbani, Pasolong. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV.Alfabeta.
10. Hasibuan, M. S. P. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
11. Julianti, D. (2024). *Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Publik dan Pengawasan Perizinan Berusaha dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi*. *Kybernology: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 2(2), 324–333.
12. Kharimah, M., Isyuniandri, D., & Probolinggo, M. (2022). Edukasi perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(4), 521–529.
13. Lestari, L., & Zulkarnaini. (2023). *Pelaksanaan E-government melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 276–286. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7886310>
14. Magdalena, dkk. (2023). *Prinsip dan Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia*.
15. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
16. Mulyana, I. (2010). *Sumber daya manusia (Edisi kedua)*. Jakarta: Salemba Empat.
17. Muslikhah, S. (2014). *Analisis kepuasan masyarakat pengguna Jamkesmas dalam menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas Teluk Belitung Kecamatan Merbau*

Kabupaten Kepulauan Meranti (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository.

18. Netha, I. G. P. R. (2023). Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk Sektor Industri Pariwisata Terkait Layanan Perizinan Pariwisata Melalui OSS (*Online Single Submission*) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar (Isu 11). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_63
19. Nugroho, A. (2010). *Rekayasa perangkat lunak menggunakan UML & Java*. Yogyakarta: Andi Offset.
20. Oktaningtyas, F. (2023). Efektivitas sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam pengurusan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
21. Pearce II, J. A., & Robinson, R. B. (2008). *Strategic management: Formulation, implementation, and control* (11th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)
25. Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda*. eJournal Administrasi Publik, 9(2), 5018–5032.
26. Ratinah, R., Hidayat, M. T., & Permana, I. (2024). *Kualitas Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach dalam Proses Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka*. Jurnal Pendidikan Indonesia, 5(12), 2104–2115.
27. Rivai, A., & D. (2015). *Manajemen strategis berdasar perubahan lingkungan bisnis, ekonomi, sosial dan politik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
28. Sedarmayanti, (2010), *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, cetakan kedua, penerbit: Mandar Maju. Bandung.
29. Setiono & Enni. (2020). *Pengantar Manajemen SDM*.
30. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
31. Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
32. Sule, E. T., & Kurniawan, S. (2014). *Pengantar manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
33. Suyani, E., & Laelatullaena, N. (2024). *Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjung Pinang*. REPEATER: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan, 2(2), 40–49.
34. Syamsuddin, S., Nur, M., Mas'ud, M., & Haeril, H. (2024). *Strategi Manajerial dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima*. JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5(4), 211–220. p-ISSN: 2721-2491 | e-ISSN: 2721-2246.

35. Usman, A. H. (2015). *Manajemen strategis syariah* (Cet. 1, hlm. 76). Jakarta: Zikrul Hakim.
36. Widayati, W. N. (2023). *Strategi branding image dalam meningkatkan daya saing sekolah SMK Ma'arif 2 Gombang Kebumen* (Skripsi, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama [IAINU] Kebumen).
37. Wulandari, A. S. R., Habiba, H., & Rahmah, A. (2023). Pembaharuan dan Dinamika Hukum dalam Proses Perizinan berusaha di Indonesia. *Gema Keadilan*, 10(1), 12-21.
38. Yohanson, dkk. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Organisasi Modern.
39. Yudani, W. S., Waluyo, & Subekti, R. (2023). *Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo*. *Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, 121–132.